

Tinjauan Konseptual Nilai-nilai Pancasila sebagai Landasan Fundamental Karakter Kewirausahaan dalam Pendidikan Pancasila

Alif Lukmanul Hakim

Universitas Islam Indonesia, Sleman, Indonesia
alif.lukmanulhakim@uii.ac.id

Abstract

This research aims to conceptually examine the values of Pancasila as the basis for ethics in the formation of entrepreneurial ethics through Civic Education. In the midst of global challenges and disruptive digitalization in Indonesian society today, it is crucial to project that entrepreneurial activities should not only focus on fiscal aspects but also be rooted in noble national values. This study uses library research with a descriptive qualitative approach by reviewing scientific literature, policy documents, and relevant previous studies. The results show that the values of Pancasila, particularly social justice, togetherness, and shared responsibility, play an important role as an ethical foundation in shaping an entrepreneurial character oriented towards economic sustainability. In addition, this study also formulates an integrative model that makes Civic Education a reference in internalizing Pancasila values into entrepreneurial character. This research contributes to the development of an integrative conceptual framework that correlates Pancasila, Civic Education, and entrepreneurship as a reference for curriculum development.

Keywords: *Pancasila; Civic Education; Entrepreneurship*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara konseptual nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etika dalam pembentukan etika kewirausahaan melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam tantangan global dan digitalisasi yang mendistrupsi ditengah-tengah masyarakat Indonesia saat ini, sangat penting untuk memproyeksikan bahwasanya kegiatan wirausaha tidak hanya fokus pada aspek fiskal saja, melainkan juga berakar pada nilai-nilai luhur kebangsaan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskripsi dengan mengkaji literatur ilmiah, dokumen kebijakan dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial, kebersamaan, dan tanggung jawab bersama, berperan penting sebagai landasan etis dalam membentuk karakter kewirausahaan yang berorientasi kepada keberlanjutan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga merumuskan sebuah model integratif yang membuat Pendidikan Kewarganegaraan sebagai rujukan dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam karakter kewirausahaan. Penelitian ini berkontribusi pada penyusunan kerangka konseptual integratif yang mengorelasikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan kewirausahaan sebagai rujukan pengembangan kurikulum pendidikan.

Kata Kunci: *Pancasila; Pendidikan Kewarganegaraan; Kewirausahaan*

Pendahuluan

Perkembangan globalisasi dan transformasi digital membuat perubahan yang nyata dalam tatanan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia. Tantangan dalam aspek kebudayaan menjadi hal yang sangat penting untuk menguji nilai-nilai Pancasila. Indonesia sendiri merupakan negara yang kaya akan kultur, bahasa, suku, dan agama. Ditambah dengan adanya pengaruh budaya yang datang dari luar maka akan semakin besar pula tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dinamika yang terjadi terkait sosial dan ekonomi global dapat memastikan bahwasanya integrasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila tidak hanya sebagai simbol persatuan saja, tetapi juga perlu diimplementasikan sebagai pedoman normatif dan landasan etika dalam menjawab berbagai persoalan global, termasuk didalamnya adalah persoalan ekonomi dan kewirausahaan (Astuti, 2021).

Dinamika yang senantiasa selalu berubah-ubah seperti ini menjadikan suatu tantangan yang besar bagi para pelaku usaha di Indonesia. Beberapa waktu lalu terdapat istilah VUCA (*volatility, uncertain, complex, ambiguity*) dan BANI (*brittle, anxiety, non-linear, incomprehensive*) yang secara garis besar menggambarkan betapa ketidakstabilan yang akan terjadi di masa depan dengan sulitnya diprediksi yang hanya berdasarkan data dan informasi yang terjadi di masa lalu. Oleh sebab itu, berbagai tantangan yang terjadi seperti itu harus disikapi dan dihadapi dengan persiapan yang dimulai dari internal terlebih dahulu.

Kemajuan teknologi juga memberikan persoalan baru dalam menjalankan praktik wirausaha di dalam negeri maupun secara global. Era digital akan mendistrupsi cara berkomunikasi, berinteraksi, dan bertransaksi. Bahkan dengan adanya teknologi yang semakin canggih seperti ini akan mempermudah dalam menjalankan strategi bisnis yang dijalankan (Nuraini, 2020). Sebagaimana dengan adanya teknologi *artificial intelligence* (AI) yang telah mendistrupsi secara fundamental pola komunikasi, interaksi, dan transaksi dalam berniaga. Hal ini akan mempercepat dan mempermudah para pelaku usaha dalam berwirausaha karena sangat menghemat dari aspek investasi proses dan sumber daya manusia (*capital expenditure*).

Sebagai bangsa Indonesia yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dalam konteks kemajuan teknologi seperti ini maka peran Pendidikan Pancasila menjadi sangat krusial dikarenakan harus mampu mengadaptasikan teknologi yang semakin modern ini dengan bijak supaya nilai-nilai Pancasila masih bisa terinternalisasikan secara mendalam tanpa mengurangi pemahaman akan teknologi yang selalu berkembang dari waktu ke waktu (Astuti, 2021). Pemahaman akan nilai-nilai Pancasila pada pelaku usaha dari waktu ke waktu memiliki dinamikanya tersendiri.

Dalam beberapa waktu terakhir, proses interpretasi nilai-nilai Pancasila terhadap pelaku usaha memiliki variasi yang berbeda-beda, hal ini menjadi tantangan yang nyata bagi pendidikan Pancasila untuk memastikan bahwa pemahaman ini tetap konsisten, akuntabel, akurat, dan selaras dengan semangat yang dijiwai oleh para pendiri bangsa. Untuk menyukseskan proses internalisasi ini perlu dilakukan upaya kolaborasi yang solid antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, masyarakat, dan *stakeholder* lainnya (Yulianti, 2019).

Contoh konkrit yang dapat dioptimalkan terkait proyeksi ini adalah pelatihan yang tersistematis untuk para pendidik, penyusunan kurikulum yang terbaru dan relevan, penggunaan teknologi yang bijak dan akurat, serta menjalankan etika bisnis yang berlaku secara patuh dan patut. Secara simultan, juga sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman nilai-nilai Pancasila ditengah-tengah masyarakat agar pemahaman akan esensi dari Pancasila menjadi lebih komprehensif, sehingga generasi muda tumbuh dan berkembang menjadi warga negara yang komitmen pada kesatuan, demokrasi, nasionalis,

gotong-royong, dan memiliki semangat Pancasila sebagai *trendsetter* yang baik untuk generasi berikutnya (Nuraini, 2020). Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sakral seperti Pancasila dalam menjalankan perannya dalam berbangsa dan bernegara. Nilai moral dan etika lebih ditekankan dibandingkan hanya untuk mendapatkan kapital yang diproyeksikan untuk memperkaya pribadi dan golongan saja. Integritas nilai dan etika sudah seyogyanya berada pada darah dan daging yang melekat dan tak terpisahkan. Indonesia memerlukan talenta yang tidak hanya kompeten secara intelektual, tetapi juga memiliki daya juang, etika, dan integritas moral serta jiwa kewirausahaan yang solid.

Namun, perkembangan kewirausahaan sering kali tidak disertai dengan pemahaman yang komprehensif terkait nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu direvitalisasi sebagai landasan etis dalam pembentukan karakter wirausaha. Pendidikan kewarganegaraan, sebagai salah satu instrumen penguatan identitas dan tanggung jawab warga negara, memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual ke dalam semangat kewirausahaan (Setiawan, 2018).

Berdasarkan kajian literatur yang ada, dapat diidentifikasi bahwasanya terdapat celah kajian (*research gap*) berupa belum adanya susunan model konseptual yang secara integratif menautkan antara nilai-nilai Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan penanaman karakter kewirausahaan. Beberapa penelitian terdahulu membahas terkait Pancasila dalam ranah etika bisnis, sementara penelitian yang lainnya mengkaji Pendidikan Kewarganegaraan atau Kewirausahaan secara terpisah. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah secara konseptual nilai-nilai Pancasila sebagai landasan fundamental karakter kewirausahaan melalui Pendidikan Kewarganegaraan untuk mewujudkan semangat kewirausahaan yang beretika ditengah-tengah dinamika yang terjadi saat ini (Anam, 2020).

Hal ini mencakup korelasi nilai-nilai Pancasila dengan etika kewirausahaan, peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam integrasi nilai dan semangat wirausaha, dan model integratif yang terjadi pada warga negara yang berwirausaha dalam praktik etika bisnis yang terjadi. Selain itu, studi ini juga mengaktualisasikan betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dasar bagi bangsa Indonesia untuk melanjutkan estafet perjuangan yang sakral bagi generasi penerus bangsa. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi landasan teoritis bagi pengembangan kajian Pendidikan Kewarganegaraan dan penguatan ekonomi Pancasila di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian berfokus pada telaah konseptual tentang nilai-nilai Pancasila landasan fundamental karakter kewirausahaan dalam kerangka Pendidikan Kewarganegaraan. Pada metode kepustakaan peneliti mengkaji, membandingkan, dan mengintegrasikan teori yang relevan dan sistematis. Sumber data pada penelitian ini atas literatur primer dan sekunder yang mencakup jurnal ilmiah yang relevan dengan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan etika kewirausahaan, buku akademik, dan kebijakan pendidikan. Sumber literatur ini ditentukan berdasarkan parameter relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas sumber, keterbaruan dalam publikasi yaitu rentang waktu 2015-2024, dengan tetap menggunakan karya yang lebih lama dengan memiliki signifikansi teoritis tinggi. Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti ialah melalui pendekatan analisis tematik yang berorientasi kepada identifikasi pola dan hubungan antar gagasan dalam literatur yang dikaji. Tahapan analisis ini meliputi lima langkah utama, yaitu; pertama, peneliti mengumpulkan

beberapa data yang didapatkan dari berbagai sumber literatur yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, kebijakan, dan dokumen kurikulum yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Kedua, menentukan poin-poin yang akan dibahas. Ketiga, memeriksa kembali sumber literatur yang relevan. Keempat, sintesis konseptual untuk mencocokkan dan mengintegrasikan temuan teoritis. Kelima, menjelaskan secara detail poin-poin yang akan dibahas seperti korelasi nilai-nilai Pancasila dengan etika kewirausahaan, peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam integrasi nilai wirausaha, serta integrasi wirausahawan beretika dalam menjalankan bisnis berdasarkan karakter fundamental Pancasila. Melalui prosedur tersebut penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif saja, melainkan juga bersifat analitis konseptual dengan mengembangkan pembahasan pada kerangka pemikiran yang dijadikan landasan penelitian empiris selanjutnya. Transparansi dalam pemilihan sumber literatur dan tahapan analisis diharapkan dapat menjadi rujukan yang kredibel dan valid atas kajian konseptual ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Korelasi Nilai-Nilai Pancasila dengan Etika Kewirausahaan

Nilai-nilai Pancasila memiliki keterkaitan secara konseptual yang kuat dengan prinsip etika kewirausahaan, terkhususnya ialah berkeadilan, inklusif, dan memegang tanggung jawab penuh secara sosial. Karakter berbasis Pancasila seperti ini memiliki peran yang linear dalam membentuk karakter wirausahawan yang tidak hanya berkompetensi dalam aspek keilmuan tentang bisnis atau berwirausaha, melainkan juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan semangat berkolaborasi antar individu.

Sejatinya, prinsip yang ada dalam dunia wirausaha juga mengedepankan komunikasi, komitmen, dan kolaborasi yang terjalin antar mitra bisnis yang ada. Kesesuaian nilai-nilai Pancasila sebagai halnya *reminder alert* bagi para wirausahawan agar senantiasa menjalankan etika kewirausahaan sesuai dengan pandangan nilai-nilai Pancasila (Wijaya, 2021). Dalam konteks pembahasan kewirausahaan, nilai-nilai tersebut sangat penting untuk menjaga keselarasan antara orientasi keuntungan dengan tanggung jawab sosial.

Pancasila sebagai dasar negara memuat akan prinsip-prinsip kewirausahaan sosial yang sangat relevan dengan hal yang dibutuhkan dalam dinamika global saat ini. Dalam sila kedua Pancasila menjelaskan kepada wirausahawan untuk mengajak agar berperilaku adil seadil-adilnya, menghargai hak asasi manusia, serta menciptakan lingkungan yang memanusiakan manusia. Selain itu, juga terdapat nilai sosial yang tercerminkan pada sila kedua Pancasila. Nilai keberlanjutan sosial ini mengajarkan wirausahawan untuk memikirkan dampak strategi bisnis yang dijalankan apakah memiliki dampak sosial secara jangka pendek dan jangka panjang.

Hal ini sebagai pemantik bagi pengusaha agar strategi bisnisnya juga memiliki *output* yang profesional untuk kebermanfaatan sosial (Fauzi, 2022). Dalam praktik kewirausahaan, sila ini menuntut pelaku usaha untuk dapat menghargai hak asasi manusia para karyawannya, memperlakukan secara adil, dan menghindari praktik bisnis yang eksploratif. Pada sila kedua yang menjelaskan pada esensi kemanusiaan maka pengusaha harus mendorong *fair trade* secara holistik. Regulasi bisnis dan perdagangan dibuat untuk mengatur jalannya bisnis supaya adil dan memandang nilai kemanusiaan.

Praktik pengusaha yang menjalankan bisnis diluar regulasi yang telah ditentukan oleh pemerintah bisa menjadikan *unfair trade* yang dapat merugikan berbagai pihak. Oleh sebab itu, etika wirausaha harus mematuhi setiap regulasi yang diatur oleh lembaga yang berwewenang. Aturan ini dibuat bukan untuk membatasi akses melainkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan agar terjadi praktik bisnis dan perdagangan secara

adil dan transparan. Namun demikian pelaksanaan praktik nilai kemanusiaan dalam kewirausahaan modern tidak selalu berjalan tanpa adanya tantangan. Terdapat tekanan kompetisi pasar, penurunan biaya, dan pertumbuhan pendapatan yang cepat sering kali para pelaku usaha mengabaikan aspek etika di dalamnya. Kondisi yang terjadi seperti saat ini memperlihatkan bahwa terdapat sebuah kesenjangan antara nilai idealis Pancasila dengan realitas yang terjadi dalam praktik kewirausahaan di Indonesia.

Oleh sebab itu, Pancasila tidak hanya berhenti pada pemahaman normatif belaka, melainkan perlu diaktualisasikan dalam proses bisnis yang aplikatif. Sejatinya, hubungan nilai Pancasila pada sila ke dua ini sangat berkolerasi dalam etika wirausaha terkhususnya untuk mendorong perdagangan yang adil, terbuka, dan transparan, serta mementingkan pada aspek sosial masyarakat (Samani & Hariyanto, 2016). Selain sila kedua, sila kelima Pancasila memiliki kesesuaian secara langsung dengan esensi kewirausahaan yang berorientasi pada keadilan sosial, komitmen bersama, dan ekonomi sosial.

Perlu adanya komitmen yang saling menguatkan diantara kedua belah pihak antara pelaku usaha dengan karyawannya. Nilai komitmen dan kolaborasi yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila sangatlah relevan dengan kegiatan kewirausahaan yang mengedepankan aspek kebersamaan antar individu seperti halnya kolaborasi yang terjadi antar fungsional di dalam internal perusahaan dan kolaborasi kemitraan dalam eksternal perusahaan (Saputra, 2017). Pentingnya kerja sama seperti inilah menjadi nilai fundamental yang krusial untuk mencapai tujuan bersama.

Hal ini sesuai dengan konsep yang dibawa oleh pendiri bangsa yang membuat Pancasila sebagai pedoman dasar untuk bekerja sama untuk menjadi negara yang makmur sesuai tujuan kebersamaan. Dalam konteks kewirausahaan yang melihat aspek ekonomi sosial sangat berperan aktif dalam meningkatkan ekonomi nasional dan mengentaskan kemiskinan (Kaelan, 2017). Kemudian pada contoh lainnya juga tertuangkan dalam sila ke lima Pancasila yang berorientasi untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata. Dalam konteks ini, pengusaha melalui perusahaannya berperan penting dalam mendorong pemerataan ekonomi nasional dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Contoh konkret ini selaras dengan tujuan Pancasila yang sudah termaktub dalam sila ke lima Pancasila. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah cita-cita luhur dari pendiri bangsa Indonesia. Peran seorang wirausahawan secara langsung sangat berjasa untuk membantu pemerintah mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia (Suryanto, 2018). Terlebih lagi Indonesia adalah negara yang berdiri atas keberagaman budaya dan kekayaan alam. Melalui pemanfaatan yang baik serta pengelolaan yang proporsional maka akan sangat relevan untuk mewujudkan ekonomi Pancasila untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Contoh lebih konkretnya ekonomi nasional ditopang banyak oleh UMKM-UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Sekitar 61% PDB nasional disumbang dari sektor UMKM. Oleh sebab itu, UMKM menyerap sebagian besar tenaga kerja dan berperan aktif terhadap penurunan angka pengangguran nasional. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas menggambarkan tentang ekosistem usaha yang terjadi di Indonesia serta dampak yang diberikan atas beberapa industri yang ada. Secara umum dapat disimpulkan bahwa terdapat satu poin yang dapat digarisbawahi terkait korelasi nilai-nilai Pancasila dengan etika kewirausahaan yang terjadi, yaitu aspek keadilan yang tercerminkan dalam sila ke dua dalam Pancasila.

Aspek keadilan tersebut sangat penting sebagai dasar fundamental sebelum melangkah lebih jauh dalam berwirausaha. Terwujudnya *fair trade* dan pemerataan ekonomi nasional melalui UMKM Indonesia merupakan suatu bukti nyata atas penerapan sila ke dua dalam Pancasila tersebut. Oleh sebab itu, nilai keadilan dalam nilai Pancasila telah memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam etika wirausaha di Indonesia, karena

telah mendorong terwujudnya praktik usaha yang selaras, tidak diskriminatif, dan mengedepankan hak dan kewajiban manusia atau karyawan. Pada prinsip ini secara langsung menuntut kepada para wirausahawan agar senantiasa berperilaku secara egaliter dibandingkan otoriter terhadap anggota tim, pelanggan, dan kemitraan. Prinsip dasar menerapkan nilai “keadilan” menjadi fundamental dalam membangun kepercayaan dan integritas dalam hubungan kemitraan bisnis, dan yang terpenting adalah konsistensi atas kerjasama yang tengah terjalin. Dapat disimpulkan bahwa, konteks ekonomi Pancasila yang mengedepankan nilai keadilan yang tidak berhenti pada aspek moral saja melainkan juga sebagai landasan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif, beretika, dan berorientasi pada kemakmuran bersama.

2. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Integrasi Nilai dan Semangat Wirausaha

Pendidikan menjadi jembatan dasar untuk memahami konteks nilai-nilai Pancasila yang teraktualisasikan dalam praktik kewirausahaan. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila bisa dilakukan secara dua cara yang berbeda. Pertama, bisa ditanamkan sedini mungkin melalui lembaga-lembaga pendidikan nasional. Kedua, bisa dilakukan diluar kelas dengan cara melalui konseling dan pelatihan. Pada cara yang pertama harus berhulu pada penyusunan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan yang relevan dan berdampak. Pada proses ini tentu lembaga pendidikan dan lembaga pemerintah bekerjasama untuk menyajikan kurikulum pembelajaran nilai-nilai Pancasila yang efektif dan efisien.

Kemudian setelah kurikulum dalam Pendidikan Kewarganegaraan sudah selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan kurikulum tersebut dalam dunia pendidikan di dalam kelas (Suryanto, 2018). Secara konseptual Pendidikan Kewarganegaraan dalam kewirausahaan dapat dipahami melalui tiga ranah, yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan kebijakan publik. Pembagian tiga ranah ini diproyeksikan untuk memperjelas mekanisme internalisasi nilai Pancasila secara keberlanjutan dan kontekstual

a. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Ranah Formal

Dalam ranah formal, Pendidikan Kewarganegaraan berfokus untuk meningkatkan kapasitas kerangka kognitif dan afektif peserta didik melalui praktik pembelajaran studi kasus, *project based learning*, dan respon etis terhadap praktik ekonomi. Contoh konkretnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan ialah pertama, integrasi nilai Pancasila dan semangat kewirausahaan ini dilakukan ketika pendidik menjelaskan materi tentang nilai-nilai Pancasila dan secara simultan peserta didik juga dilatih untuk dapat bekerjasama, bertanggung jawab, dan berani mengambil keputusan. Selain itu pendidik juga dapat memberikan apresiasi dan motivasi agar peserta didik senantiasa semakin bersemangat dalam belajar. Kedua, dalam pembelajaran nilai-nilai Pancasila pendidik juga melatih bagaimana cara menyelesaikan setiap masalah (*impediment*) yang terjadi dan bagaimana caranya *mind mapping* atas setiap persoalan yang ada (Lestari, 2021). Pola pikir seperti ini sesuai dengan karakteristik nilai Pancasila khususnya pada sila ke empat yang mengutamakan diskusi atau menelaah setiap persoalan sebelum menentukan atau memutuskan suatu hal.

Ketiga, peran Pendidikan Kewarganegaraan melalui kurikulum dan pembelajaran di dalam kelas ialah mengajarkan kepada peserta didik agar memiliki jiwa yang berani untuk menghadapi tantangan yang ada, siap bersaing secara sehat, dan siap mengoptimalkan segala potensi yang ada di dalam dirinya. Oleh sebab itu, peran Pendidikan Pancasila dalam konteks di dalam kelas sangat penting dalam eksplorasi potensi diri setiap individu serta menjadi jembatan nilai kebangsaan dan ketrampilan kewirausahaan.

b. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Ranah Nonformal

Pada ranah nonformal, Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai ruang pembelajaran kontekstual yang fleksibel dan berbasis pengalaman dan praktik secara langsung. Kegiatan pelatihan kewirausahaan yang dilakukan oleh komunitas, *non-government organization* (NGO), dan organisasi masyarakat lainnya dapat menjadikan medium efektif untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila. Adanya integrasi melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang mana peserta tidak hanya pandai dalam praktik wirausaha saja, melainkan juga terdapat nilai gotong-royong, adil, dan bertanggung jawab sosial.

Integrasi nilai dan semangat wirausaha dapat ditumbuhkan seringnya dalam praktik lapangan. Melalui pengalaman inilah yang akan mempermudah dalam internalisasi dan integrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Pada skema kedua dapat diaktualisasikan melalui kegiatan penanaman nilai-nilai Pancasila yang dilakukan secara non-formal atau dilakukan tanpa dibatasi oleh ruang-ruang kelas saja. Cara ini dapat diikuti oleh semua wirausahawan yang membutuhkan pemahaman lebih terkait betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan ekonomi Pancasila yang mementingkan aspek kemajuan bangsa dibandingkan untuk memperkaya kebutuhan pribadi atau golongan saja.

Proses penanaman nilai-nilai Pancasila yang diaktualisasikan diluar kelas dapat dilakukan dalam bentuk konseling bersama ahli atau konsultan yang sudah memiliki bidang keilmuan yang relevan dalam menghayati, memahami, dan mampu mengelaborasi nilai-nilai Pancasila dalam aspek kewirausahaan (Arifin, 2023). Wirausahawan yang memiliki wawasan kebangsaan yang didapatkan di dalam proses pendidikan kewarganegaraan akan memiliki semangat wirausaha yang selalu memprioritaskan kepentingan bangsa, dibandingkan wirausahawan yang tidak memiliki semangat kebangsaan.

Selain itu, wirausahawan yang memiliki wawasan kebangsaan akan memproduksi suatu produk yang mencerminkan budaya dan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa, seperti produk batik, *eco friendly fashion*, tenun, dan produk-produk lainnya (Kusuma, 2022). Selain mendapatkan keuntungan dalam aspek ekonomi, memproduksi produk yang berkaitan dengan kebudayaan bangsa juga sebagai salah satu upaya untuk mengenalkan kebudayaan Indonesia ke kancah global dan sebagai bentuk upaya untuk melestarikan kebudayaan bangsa agar tetap lestari dan terjaga abadi. Menjaga atau melestarikan adat budaya bangsa merupakan bentuk tanggung jawab segenap bangsa Indonesia dengan berbagai bentuk cara yang dilakukannya. Salah satu tanggung jawab sebagai seorang bangsa dari seorang wirausahawan ialah mampu melahirkan suatu produk usaha yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengenalkan budaya dan sekaligus mendapatkan manfaat fiskal dari produk usaha tersebut. Semangat dan tanggung jawab inilah yang senantiasa ditanamkan bagi segenap pelaku usaha agar menjalankan usaha tidak hanya fokus pada keuntungan belaka melainkan juga fokus pada pelestarian adat budaya sebagai bentuk semangat nasionalisme bangsa.

c. Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Ranah Kebijakan Publik

Ranah kebijakan publik menjadi dimensi penting dalam memperkuat peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam praktik kewirausahaan. Sangat penting adanya dukungan terhadap UMKM berbasis komunitas dan ekonomi sosial di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapatkan pemahaman akan materi yang berkaitan dengan penanaman nilai-nilai Pancasila. Hal ini juga dapat memberikan dampak positif kepada kultur kewirausahaan yang ada di Indonesia agar terhindar dari *unfair trade*, *predatory pricing*, spekulasi, dan penipuan. Pelatihan yang diakomodir oleh pemerintah jika dijadikan sebagai persyaratan wajib dan memiliki poin capaian tersendiri

akan jauh lebih berdampak dibandingkan hanya sebagai syarat formal belaka (Rahayu, 2020). Setiap pelaku usaha yang menjalankan usaha di wilayah NKRI akan diwajibkan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan itu diawasi oleh pemerintah melalui nilai-nilai capaian yang mereka kerjakan. Adanya skema seperti ini dapat disimpulkan bahwa semakin banyak poin capaian yang dikerjakan oleh para pelaku usaha maka semakin besar pula pelaku usaha menjalankan bisnis sesuai nilai-nilai Pancasila.

Oleh sebab itu, tujuan untuk membangun ekonomi Pancasila juga akan semakin mudah di ukur dan semakin terarah untuk dikembangkan. Melalui pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan yang terstruktur dan terarah untuk mengintegrasikan nilai dan semangat wirausaha maka akan semakin dekat dalam mewujudkan ekonomi Pancasila di Indonesia. Terdapat pekerjaan rumah yang masih banyak yang harus dikerjakan oleh bangsa Indonesia saat ini, khususnya dalam sektor perekonomian seperti mulai dari pemerataan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, daya beli yang masih rendah, dan lainnya.

Sebagai contoh data di salah satu problem di atas ialah Tingkat pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Data pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 7,07% dan dalam satu tahun sebelumnya ada peningkatan yang cukup signifikan dikarenakan adanya wabah virus *covid-19* yang memaksa para pelaku usaha menutup usahanya dan melakukan PHK secara sepihak dikarenakan hal tersebut (Kusuma, 2022). Seiring dengan pemulihan perekonomian yang terjadi saat ini maka akan membuat ekosistem bisnis akan lebih kondusif dibandingkan sebelumnya.

Peran wirausahawan saat ini sebagai *trendsetter* dan *problem solver* dalam upaya membantu pemerintah untuk mengerjakan berbagai pekerjaan rumah yang masih belum selesai tersebut. Adanya kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan pelaku usaha yang sama-sama menyongsong pada tujuan utama untuk kesejahteraan bangsa adalah salah satu kerjasama yang luar biasa antara negara dengan rakyatnya. Negara dan rakyat sama-sama mementingkan kepentingan bangsa daripada hanya memperkaya dan mendapatkan keuntungan fiskal pada individu atau golongan saja. Oleh sebab itu, integrasi pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan sangat memberikan dampak positif untuk mengintegrasikan nilai dan semangat wirausaha yang berorientasi pada peningkatan ekonomi Pancasila (Wibowo, 2023).

Berdasarkan ketiga ranah tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki fungsi untuk mekanisme integratif yang menjembatani antara nilai Pancasila dengan pembentukan karakter kewirausahaan. Pondasi utama dalam Pendidikan Kewarganegaraan ialah membentuk kesadaran etis dan identitas kewargaan untuk mewujudkan kewirausahaan yang berkeadilan. Dengan pendekatan sistematis dan kontekstual, Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi secara nyata dalam menciptakan wirausahaan yang profesional, tetapi juga bertanggung jawab penuh sebagai warga negara.

3. Model Integratif: Warga Negara Wirausaha Beretika

Berdasarkan sintesis konseptual nilai-nilai Pancasila, peran Pendidikan Kewarganegaraan, dan prinsip kewirausahaan, penelitian ini merumuskan sebuah model *integrative* untuk membentuk etika dan karakter wirausahaan. Model integratif ini merupakan salah satu bentuk perwujudan profil sebagai warga negara yang paripurna yang mengintegrasikan ketiga aspek penting dalam berbangsa dan bernegara. Ketiga aspek tersebut ialah kewarganegaraan aktif, kewirausahaan produktif, dan etika serta karakter wirausaha yang sangat urgen dalam proses pembangunan peradaban manusia di Indonesia. Kolerasi ketiga poin tersebut merupakan satu kesatuan yang saling memberikan dorongan kemajuan atas perekonomian nasional.

a. Komponen Utama Model Integratif

Model integratif ini memuat tiga komponen utama yaitu, nilai dasar Pancasila, wahana internalisasi melalui Pendidikan Kewarganegaraan, dan karakter kewirausahaan beretika sebagai luaran. Pertama, nilai dasar Pancasila sebagai fondasi normatif dan ideologis. Dalam konteks kewarganegaraan, sila kedua dan sila kelima menjadi kunci dasar menekankan manusia yang berkeadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab. Sebagai warga negara aktif yang memiliki sikap dan karakter yang baik untuk menjalankan suatu usaha yang produktif tentu akan mentransformasikan segala daya dan upaya yang dimilikinya untuk kemajuan dan kebaikan bangsa (Hidayat, 2019).

Oleh sebab itu, model ini menuntut wirausahawan yang tidak hanya menjadi warga negara tetapi juga menjadi wirausahawan yang kuat dalam ekonomi dan beretika tinggi. Nilai dasar ini membentuk orientasi moral yang membatasi perilaku kewirausahaan yang eksploitatif. Kedua, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana internalisasi nilai. Melalui pembelajaran formal, pembelajaran nonformal, dan kebijakan publik maka Pendidikan Pancasila dapat ditransformasikan dari normatif menjadi aplikatif. Pada model integratif ini memiliki fundamental teoritis yang menekankan untuk membentuk warga negara wirausaha yang beretika. Pada teori Pendidikan Kewarganegaraan yang mengajarkan kepada bangsa agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab, demokratis, kritis, dan berorientasi kepada kepentingan bersama.

Hal ini menjadi acuan dasar bagi warga negara Indonesia khususnya wirausahawan dalam menjalankan proses bisnisnya. Asas egaliter dan keadilan adalah wajib diterapkan kepada seluruh anggota tim dalam organisasinya. Tidak ada sekat penghalang antara *C-Level* dengan staf dalam Perusahaan tersebut, sekat bisa menjadi *barrier* penghalang dan penghambat atas keterbukaan informasi dan komunikasi di dalam satu tim (Marlina, 2021). Oleh sebab itu, menerapkan asas dasar dalam teori Pendidikan Kewarganegaraan adalah langkah dasar untuk mewujudkan iklim bisnis yang Pancasilais kepada seluruh anggota tim.

b. Relasi Antar Komponen Model

Korelasi antar komponen dalam model integratif bersifat dinamis dan saling mempengaruhi. Pancasila memberikan pandangan normatif bagi Pendidikan Kewarganegaraan, sedangkan Pendidikan Kewarganegaraan memberikan panduan transformasi nilai dalam membentuk karakter kewirausahaan. Dalam kerangka ini, Pendidikan Kewarganegaraan menjadi penengah dan titik temu antara ideologi dengan praktik ekonomi. Oleh sebab itu, tanpa adanya peran Pendidikan Kewarganegaraan maka Pancasila masih berada pada tataran simbolik, sementara itu praktik bisnis juga masih terjebak pada rasionalitas ekonomi saja yang hanya berfokus pada keuntungan fiskal belaka (Handayani, 2020).

Wirausahawan yang memiliki pandangan futuristik pasti akan menaruh aspek nilai dan keberlanjutan menjadi prioritas dibandingkan hanya keuntungan dalam waktu pendek. Terlebih lagi nilai dan keberlanjutan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sosial. Sejatinya suatu bisnis itu hidup dan lahir ditengah-tengah masyarakat dan idealnya akan juga memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat juga. Selain itu, produk yang dipasarkan juga mengandung nilai budaya Indonesia sekaligus menjadi momen yang baik untuk melestarikan dan mengenalkan budaya Indonesia ke kancah yang lebih luas. Oleh sebab itu, penerapan pada teori ini merupakan komposisi yang paripurna sebagai wirausahawan dalam implementasi bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan dan kebermanfaat nilai sosial. Selain itu, melalui etika yang baik akan merepresentasikan kepada dunia akan karakter bisnis yang dilakukan oleh wirausahawan nasional dan tentu akan memberikan kesan yang baik kepada dunia (Kusuma, 2022).

c. Luaran dan Implikasi Model Integratif

Luaran yang diharapkan dari model integratif ialah terbentuknya karakter kewirausahaan yang beretika dan berorientasi pada keadilan sosial. Pada dasarnya implikasi model integratif ini terdapat dua aspek utama yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis. Implikasi teoritis menjadi pengembangan kajian Pendidikan Kewarganegaraan dan kewirausahaan berbasis nilai yang menyajikan konseptual integratif. Implikasi praktis, sebagai acuan pengembangan kurikulum, kebijakan publik berdasarkan nilai Pancasila, dan pembelajaran yang aplikatif.

Dengan menerapkan konsep teoritis fundamental dalam model integratif untuk mewujudkan warga negara yang beretika ialah meliputi beberapa *constraint* yaitu individu, sosial, ekonomi, dan politik. Melalui kerangka teoritis ini tentu akan dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas oleh wirausahawan yang menjalankan bisnis untuk mewujudkan ekonomi Pancasila di Indonesia. Pada dimensi individu tentu akan berdampak pada pembentukan karakter generasi bangsa yang bermoral, mandiri, dan memiliki pemikiran yang tidak skeptis.

Kemudian pada aspek sosial akan memupuk atas kepedulian dan kebersamaan. Selain itu, hal ini juga akan mendorong semangat partisipatif setiap warga negara untuk peduli pada pembangunan ekonomi nasional. Dilanjutkan pada aspek ekonomi adalah ditandai dengan adanya pertumbuhan bisnis-bisnis mikro yang berkelanjutan (Arifin, 2023). Adanya pertumbuhan UMKM yang ada di Indonesia tentu menandakan bahwasanya perekonomian dan perdagangan di Indonesia cukup bagus. Perlu diperbanyak pengusaha di Indonesia agar perekonomian nasional semakin kuat, karena dengan adanya UMKM tersebut tentu akan menyerap lebih banyak tenaga kerja dan akan mengurangi angka pengangguran aktif di Indonesia.

Kemudian yang terakhir pada aspek politik adalah masyarakat juga mengawasi setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah serta tetap kritis atas setiap hal berjalan agar fungsi pengawasan yang dilakukan yang dirakyat kepada pemerintah berjalan dengan bijak. Implementasi model integratif seperti ini tentu memberikan ruang kebijakan yang berbeda namun saling berkolerasi satu dengan yang lainnya. Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan penilaian yang diberikan tidak hanya dibatasi oleh aspek kognitif belaka, melainkan juga dilihat dalam sudut pandang afektif dan psikomotorik seseorang yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya (Lestari, 2021).

Materi yang diberikan tidak hanya fokus pada aspek intelegensi belaka namun aplikasi atas materi tersebut justru lebih penting dibandingkan nilai diatas kertas. Dikarenakan Pancasila adalah ilmu aplikatif oleh karena itu pemikiran yang jernih juga teraktualisasikan dalam tindakan yang beradap. Dalam teori berpikir Taksonomi Bloom terdapat enam tingkatan berpikir pada aspek kognitif seseorang, yaitu; mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Kemudian pada konteks aplikatif pada model integratif ini setidaknya wirausahawan berada pada level 2 dan 3, yaitu memahami dan menerapkan atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Standar minimal inilah diharapkan menjadi suatu landasan fundamental bagi seorang wirausahawan untuk membentuk karakter wirausaha yang berjiwa Pancasila. Aplikatif dalam model integratif seperti ini juga memberikan ruang yang besar dalam dunia usaha untuk mengembangkan usaha atau bisnis yang dilakukannya. Sebagai contoh konkretnya perlu digalakan secara menyeluruh atas penyuluhan pelatihan bisnis seperti membuat acara inkubasi bisnis yang menggabungkan atas nilai etika dan tanggungjawab sebagai warga negara. Serta mengupayakan dalam menanamkan nilai bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja melainkan juga sebagai bentuk kontribusi

kepada sosial. Melalui adanya berbagai pelatihan bisnis yang dapat menunjang kompetensi dan kapasitas pengusaha maka secara langsung hal ini tentu akan meringankan beban pemerintah akan pengurangan beban pengangguran aktif nasional (Samani & Hariyanto, 2016). Semakin banyaknya mitra kerja menyerap tenaga kerja maka semakin meningkat juga perekonomian nasional. Oleh sebab itu, model integratif seperti ini secara perlahan dan berkelanjutan akan membentuk etika karakter wirausaha yang bijak di Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai Pancasila memiliki peran yang krusial sebagai landasan etis dalam pembentukan karakter kewirausahaan di Indonesia. Nilai-nilai kebangsaan yang tercerminkan dalam Pancasila menjadi fundamental etis untuk membangun karakter wirausaha yang berkarakter dan bertanggung jawab. Selain itu, nilai-nilai Pancasila ini juga dapat menjawab tantangan dari dinamika sosial dan ekonomi global yang mengakomodasi berbagai keberagaman budaya, perubahan teknologi yang masif, dan memastikan untuk menumbuhkan kolaborasi antar *stakeholder* secara partisipatif. Sebagai langkah konkret yang dilakukannya yang sudah tercerminkan pada sila ke dua dan ke lima Pancasila yang sangat aplikatif dilakukan seperti mendorong untuk mengikuti *fair trade* dan mendorong ekspansi pemerataan ekonomi nasional dan tanggung jawab sosial dari pengusaha untuk kepentingan ekonomi nasional. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada perumusan model integratif yang menghubungkan nilai-nilai Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan pembentukan karakter kewirausahaan. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki fungsi yang sangat signifikan dan strategis dalam menyemai nilai-nilai Pancasila secara sistemik dan tertarget. Melalui kurikulum yang relevan maka akan sangat efektif dan efisien dalam implementasi nilai-nilai Pancasila kepada calon generasi bangsa, terkhususnya dalam penanaman karakter fundamental wirausaha yang menjadi representasi ekonomi nasional dikancah internasional. Pengusaha yang memiliki nilai moral dan etika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila akan lebih bijak dalam menentukan strategi bisnis yang akan dijalaninya. Selain itu, melihat proses bisnis dalam kacamata yang lebih luas seperti memandang karyawan tidak menjadi aset perusahaan melainkan memanusiakan manusia dan menilai manusia di dalamnya pandangan egaliter tanpa dibeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Meskipun demikian penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, kajian ini sepenuhnya bersifat konseptual dan berbasis studi kepustakaan. Kedua, literatur yang digunakan mayoritas masih dalam konteks Indonesia. Ketiga, interpretasi Pancasila dalam kewirausahaan masih dipengaruhi oleh perspektif penulis dan literatur yang digunakan. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian lanjutan disarankan untuk menguji model integratif ini secara kualitatif dan kuantitatif. Dengan demikian, model integratif dalam penelitian ini dapat menjadikan rujukan aplikatif nyata bagi penguatan pendidikan dan pengembangan ekonomi Pancasila.

Daftar Pustaka

- Anam, K. (2020). Konsep Warga Negara Produktif dan Beretika dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 88-97.
- Arifin, M. (2023). Pendidikan Pancasila dan Kewirausahaan Sosial: Telaah Konseptual. *Jurnal Filsafat Dan Pendidikan*, 4(1), 21-31.
- Astuti, D. (2021). Integrasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Karakter di Perguruan Tinggi. *Jurnal Civic Education*, 10(1), 45-52.
- Fauzi, A., & N. S. (2022). Entrepreneurial Citizenship: Integrating Civic Education and Entrepreneurship for Youth Empowerment in Indonesia. *Journal of Social Studies Education Research*, 13(1), 85-101.

- Handayani, T. (2020). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Jiwa Kewirausahaan Berbasis Pancasila. *Civics: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 17(2), 234-244.
- Hidayat, A. (2019). Transformasi Nilai Pancasila Dalam Pembelajaran Kewirausahaan Pada Generasi Muda. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(3), 56-66.
- Kaelan, K. (2017). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kusuma, R. (2022). Etika Kewirausahaan dan Pendidikan Nilai Pancasila di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 26(1), 71-80.
- Lestari, A. (2021). Internalisasi Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Spirit Entrepreneur Mahasiswa. *Jurnal Edukasi Kewarganegaraan*, 5(2), 112-121.
- Marlina, R. (2021). Integrasi Pendidikan Kewarganegaraan dan Nilai Etis dalam Kewirausahaan Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(1), 14-24.
- Nuraini, L. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Media Internalisasi Nilai Kewirausahaan dan Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 123-132.
- Rahayu, E. (2020). Civic Education and Character Development in Indonesian Universities. *International Journal of Educational Development*.
- Samani, M., & Hariyanto, H. (2016). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Saputra, R., & N. Y. (2017). Moral Entrepreneurship and Pancasila Values: A Case Study of Young Entrepreneurs in Indonesia. *Asian Journal of Business Ethics*, 6(1), 33-45.
- Setiawan, B. (2018). Revitalisasi Nilai Pancasila dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Civicus*, 6(1), 59-66.
- Suryanto. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Depok: Rajawali Pers.
- Wibowo, H. (2023). The Role of National Ideology in Shaping Ethical Entrepreneurial Culture in Developing Nations: An Indonesian Perspective. *Journal of Business Ethics Education*, 20, 73-91.
- Wijaya, M. (2021). Penguatan Etika Kewirausahaan Berbasis Nilai Pancasila di Kalangan Generasi Z. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(1), 101-110.
- Yulianti, A. (2019). Etika Bisnis dalam Perspektif Pancasila: Relevansi terhadap Praktik Kewirausahaan di Era Milenial. *Jurnal Filsafat*, 29(2), 235-246.
- Zimmerer, T. W., & Scarborough, N. M. (2021). *Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management*. London: Pearson.